

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alston, Phillip. *"Out of The Abyss: The Challenges Confronting The New Un Committee on Economic, Social and Cultural Rights."* Hum. Rts. Q. 9 (1987): 332.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *makalah disampaikan pada Lecture Peringatan 10* (2008).
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Edisi Revisi", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 97–99.
- Safa'at, Rachmat. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Sen, Amartya. *Poverty And Famines: An Essay On Entitlement and Deprivation*. Oxford university press, 982.
- Suteki dan Galang taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 133.
- Subarsono, A. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- United Nations Centre for Human Rights. *Right to Adequate Food as a Human Right*. Vol. 1. New York: United Nations, 1989.
- Wibawa, Samodra. (2011). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah." (2008).

Jurnal Online

- Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2 No. 1 (2019): 1–12.
- Aji, Wahyu Trisno. "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 3 (2025):

- 215-226. Diakses pada 21 Juli 2025. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>.
- Hakim, B. N., and Wulansari Yulia. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025) 267–83. Diakses pada 14 November 2025. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40-52. Diakses pada 21 Juli 2025. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Safa'at, Rachmat. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal Ham* 12, no. 2 (2021): 227. Diakses pada 1 Oktober 2025. [10.30641/ham.2021.12.227-244](https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244).
- Salasa, Andi Rachman. "Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik* 13, no. 1 (2021): 35-48. Diakses pada 25 November 2025. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Van Meter, D. S., & Van Horn. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*, 6(4), 445–488. (1975).
- "Banyak Polemik, DPRD Jawa Barat Minta Program MBG Dievaluasi. (Metrotv:2025). <https://www.metrotvnews.com/read/KdZCjWIR-banyak-polemik-dprd-jawa-barat-minta-program-mbg-dievaluasi>
- "Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik". (Transparency International: 2025). <https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/>
- Andi Firdaus, "BGN: Dugaan Penyelewengan Dana MBG karena Masalah Internal Yayasan". (Antara: 2025). <https://www.antaranews.com/berita/4775881/bgn-dugaan-penyelewengan-dana-mbg-karena-masalah-internal-yayasan?>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022", (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan: 2023). <https://layanandata.kemkes.go.id/katalog-data/ssgi/ketersediaan-data/ssgi-2022>.
- Pattiro, "Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan", (Kejaksaan RI: 2025). <https://pattiro.org/2025/02/tanpa-payung-hukum-yang-jelas-akuntabilitas-mbg-dipertanyakan/?>.

Riana Al Ibrahim, Darul Amri,” Ribuan Kasus Keracunan Akibat MBG – Evaluasi SPPG dan Standar Higienis Jadi Prioritas Pemerintah”.(Jakarta:BBC News, 2025).

Setianto, Endang. “Syarat Menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis.” (Legalitas.org: Jakarta, 2025).

Yayan A. Brilyana. “Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot Bandung Siapkan Kelompok Kerja Terintegrasi”. (Humas Kota Bandung: 2025). <https://bandung.go.id/news/read/10620/kawal-program-makan-bergizi-gratis-pemkot-bandung-siapkan-kelompok-ke>

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang *Ketahanan Pangan Dan Gizi*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan *Gizi*.

Keputusan Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025